

ABSTRAK

Kebijakan komunikasi pemblokiran situs media online dengan studi kasus pemblokiran situs-situs Islam yang dianggap memiliki konten radikalisme berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 ini sempat ramai diperbincangkan. Pemblokiran yang dilakukan pada akhir bulan Maret 2015 ini berdasarkan laporan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dimana dalam penerapannya mengundang pro dan kontra. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran analisis dan evaluasi proses kebijakan Kemkominfo. Kebijakan Pemerintah yang bertujuan melindungi warga negara dari paham-paham radikalisme yang kian menyebar yang diikuti dengan aktivitas terorisme ini menjadi dilematis. Cara baru dalam penyebaran paham radikalisme melalui media online kian meningkat. Selain itu, dalam studi kasus ini Kemkominfo tidak melibatkan publik seperti pemilik situs, pihak-pihak yang berkompeten untuk melakukan diskusi, penyaringan sampai keputusan kebijakan. Publik terlibat ketika kecamatan masyarakat berdatangan hingga meramaikan media sosial dengan penolakan-penolakan atas pemblokiran sejumlah situs media Islam. Proses kebijakan yang tak runtut dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 dan Alur kebijakan yang dibuat oleh Kemkominfo ini menjadi pembahasan menarik untuk kemudian dikaji lebih dalam. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan tipe penelitian evaluatif yang didukung dengan studi dokumen, studi kasus dan hasil wawancara mendalam dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kata kunci : Kebijakan komunikasi, radikalisme dalam media online, keterlibatan publik